

RENCANA

KERJA

2020



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Jualah Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan rancanangan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) nantinya.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga

RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang,

Juni 2019

**KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. H. TARMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681111 199009 1 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2018	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	42
4.1. Program dan Kegiatan	42
BAB V PENUTUP	53
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	53

5.2. Kaidah-kaidah	53
5.3. Rencana Tindak Lanjut	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	14
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	25
Tabel 2.3	Klasifikasi Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	26
Tabel TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
Tabel TC.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	32
Tabel TC.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran	41
Tabel TC.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja PD) yang merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-undang tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja tahun 2020.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD;
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program/kegiatan kedalam KUA - PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020;

3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan, melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Badan Kesbangpol dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu perencanaan yang baik.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan program

prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2020 dan juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas dengan dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 28 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2020 (berita daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 31, seri E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoprasionalakan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Merumuskan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Pengertian Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja Provinsi/Kab/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menguraikan evaluasi pelaksanaan renja, baik itu realisasi keuangan dan capaian kinerja output.

- 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 2.1.4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.1.5. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Menguraikan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, struktur organisasi,data kekuatan pegawai dan indikator kinerja utama.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memuat isu-isu penting pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3.1. Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional;

2.3.2. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan penjelasan perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Memuat penjelasan usulan pemangku kepentingan dalam merumuskan program/ kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan pokok-pokok Kebijakan prioritas program nasional yang terkait arah kebijakan daerah dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Memuat penjelasan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan penunjang yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Bagian ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Menguraikan kaidah-kaidah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Memuat penjelasan faktor-faktor tindaklanjut dalam pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2018

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telahdicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesaidilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Dari Rancangan Rencana Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 sebanyak 5 (lima) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan, tetapi yang disetujui di Renja akhir hanya 5 (lima) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan, selanjutnya sampai penetapan pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya bisa mengakomodir 5 (lima) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan. Tetapi pada Perubahan Anggaran mengalami pengurangan anggaran karena adanya 5 (lima) Kegiatan yang dihapus yaitu

1. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 1. Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara;
 2. Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan.
2. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri.
 1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
 1. Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama;
 2. Penguatan Komunikasi dan Kerjasama antar Pemerintah dan Ormas.

Dari 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan tersebut jumlah pagu Rp. 4.086.232.200,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.825.076.341,00 ,- atau realisasi keuangan 93,61% dengan rata-rata capaian kinerja output sebesar 100,00%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Tahun 2018 tidak ada program/kegiatan yang tingkat realisasi target kinerjanya dibawah 100%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Tahun 2018 ada 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang mencapai realisasi target kinerja 100%.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Tahun 2018 tidak ada program/kegiatan yang tingkat realisasi target kinerjanya melebihi 100%.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/ Kegiatan

Pada tahun 2018 tidak ada program/kegiatan yang tingkat realisasi target kinerjanya dibawah ataupun yang melebihi 100%.

2.1.5. Implementasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Implementasi yang timbul dari tercapainya target kinerja program/ kegiatan terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja PD tahun lalu mempunyai kinerja yang baik, maka untuk menetapkan target kinerja sebanding dengan tahun sebelumnya atau sesuai target yang telah ditetapkan pada renstra.

2.1.6. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran target kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan besaran anggaran tahun berikutnya harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai;
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pencapaian Renstra sampai tahun 2018 dapat dilihat pada **tabel 2.1**

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4;100%	0	2;100%	4;100%	200%;100 %	2;100%	4;100%	100%;100%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	323	0	59	59	100%	59	59	18%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n- 1)	Realisas i Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	323	0	59	59	100%	59	59	18%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	323	0	59	59	100%	59	59	18%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n- 1)	Realisas i Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01. 01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01. 01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	25	0	5	5	100%	5	5	20%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.02	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	4	0	12			9			Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.02.01	Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme	Jumlah Laporan	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.02.03	Forum Komunikasi dan Koordinasi Kominda	Jumlah Laporan	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.02.06	Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Serta Pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung	Jumlah Laporan	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.02.08	Penyelenggaraan Penanganan Konflik	Peringkat pelaporan Konflik Sosial Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	0	5	5	100%	5	5	250%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.03	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi; persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0%;0%	0	0%;3%			0%;2%			Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.03.04	Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sekolah yang dikunjungi	70	0	14	14	100%	14	14	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.03.05	Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara	Jumlah Kader Bela Negara	278	0	44	0	100%	44	0	0%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.03.08	Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Cakupan Kategori Lomba	3	0	3	0	100%	0	0	0%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.03.15	Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HUT RI	25000	0	5000	5000	100%	5000	5000	20%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.04	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah; persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	7;80%	0	7;45%			7;50%			Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.04.03	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.04.07	Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik	Jumlah peserta yang memahami Etika dan Budaya Politik	1600	0	200	200	100%	280	200	13%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.04.08	Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rekomendasi	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.04.12	Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	13	0	11	11	100%	11	11	85%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.04.16	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Jumlah peserta yang memahami Undang-Undang Pemilu	2100	0	420	0	100%	0	0	0%	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n- 1)	Realisas i Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.05	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	65;1100;70	0	25;200;30			35;500;40			Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.05.02	Forum Komunikasi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama	Jumlah Rekomendasi	15	0	3	0	100%	3	0	0%	Badan Kesbangpol

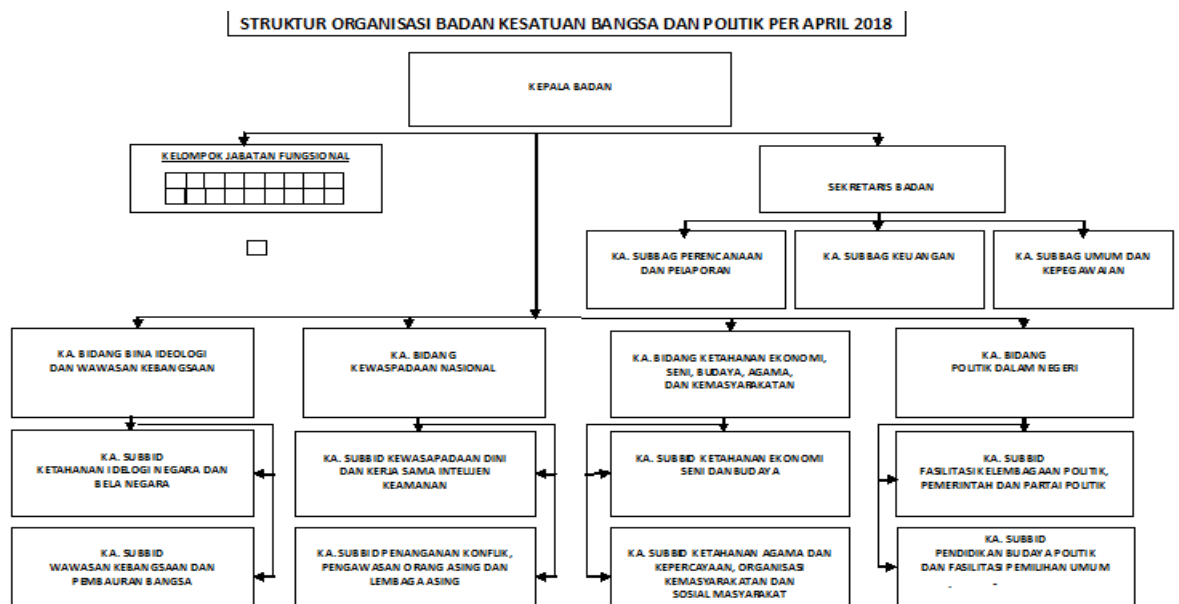
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SOPD Tahun 2022 (Akhir Priode Restra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Tahun (n)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-1)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai Dengan Tahun Berjalan 2018		Seksi Penanggungjawab
					Target Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.1.05.01.05.04	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika	Jumlah Peserta yang memahami bahaya Narkotika	1450	0	50	50	100%	150	50	3%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.05.09	Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi Serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah	Jumlah Dokumen	20	0	4	4	100%	4	4	20%	Badan Kesbangpol
1.05.1.05.01.05.14	Penguatan Komunikasi dan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Ormas	Jumlah Ormas	50	0	10	0	100%	0	0	0%	Badan Kesbangpol

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 13 Seri D), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung memiliki struktur organisasi sebagaimana disajikan dalam **gambar 2.2**.



Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung sebanyak 57 pegawai, dengan status kepegawaian 39 PNS dan 18 Pegawai Honorer. Kualifikasi pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 28 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 6 orang, Kualifikasi pendidikan Honorer terdiri dari S1 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA 12 orang.

Tabel 2.2.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	DOKTORAL	-	-	-
2.	PASCA SARJANA/S2	4	-	4
3.	SARJANA/S1	18	10	28
4.	DIPLOMA IV	-	-	-
5.	DIPLOMA III	1	0	1
6.	DIPLOMA I/II	-	-	-
7.	SLTA	2	4	6
8.	SLTP	-	-	-
9.	SD	-	-	-
JUMLAH		25	14	39

Tabel 2.3.
Klasifikasi Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	DOKTORAL	-	-	-
2.	PASCA SARJANA/S2	-	-	-
3.	SARJANA/S1	1	3	4
4.	DIPLOMA IV	-	-	-
5.	DIPLOMA III	2	-	2
6.	DIPLOMA I/II	-	-	-
7.	SLTA	10	2	12
8.	SLTP	-	-	-
9.	SD	-	-	-
JUMLAH		13	5	18

Pada Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
				Tahu n	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza			0	90%	80%	68%	0	48,4%	80%	68%	
2	persentase menurunnya kasus konflik sosial			0	86,90 %	73,9	60,8	0	86,90 %	73,9	60,8	
3	persentase partisipasi pemilih			61,70 %	68%	71	71	61,70 %	68%	71	71	
4	Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi.			0	88,3	74,4	62,8	0	88,3	74,4	62,8	
5			pembinaan politik di daerah	7	7	7	7	2	4	7	7	
6			Pembinaan LSM,Ormas dan OKP	7	7	7	7	0	1	7	7	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam penyusunan rancangan rencana kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dilakukan terlebih dahulu evaluasi, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan dan kebijakan pelaksanaan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirumuskan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Isu melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan salah satu lembaga survey bahwa dari 1200 responden di provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 9 persen yang hapal sila-sila pancasila sisanya tidak tahu.

Menjadi sebuah bangsa yang memegang teguh jati diri merupakan cita-cita besar yang patut di perjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakatnya memegang teguh jati diri tidak kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai idiologi mulai melemah dalam pengamalannya disebabkan kerena beberapa faktor antara lain:

- a. Lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. Kesadaran hukum dan konstitusi;
- c. Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Kurangnya toleransi sesama anak bangsa.

2. Isu melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat;

Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain;
- b. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda;
- c. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia;

- d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri.
3. Isu rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi;
Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif dengan menerapkan kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen.
Tujuannya menjembatani kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur yang belum membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan.
Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk memperkuat upaya untuk melahirkan peraturan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan.
4. Isu melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental);
Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi.
5. Isu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari hal tersebut, sehingga perlunya memberikan pemahaman, pendidikan dan pengajaran arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

2.3.1. Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional

1. Dengan Melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme berdampak pada fenomena kecendrungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Dengan Melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan berbudaya di masyarakat akan menimbulkan kerawanan, dalam hal ini pemahaman akan pentingnya menanamkan nilai-nilai toleransi yang mulai terkikis perlu digalakkan, karena :
 - a. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi;
 - b. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama tentang agamanya sendiri dan agama pihak lain;
 - c. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain;
 - d. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat;
 - e. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah;
 - f. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat.
3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi menggambarkan bahwa peran perempuan dan laki-laki belum seimbang;
4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental), berakibat krisis mental;
5. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, akibatnya keamanan tidak terkendali.

2.3.2. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tantangan

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan membangkitkan semangat nasionalisme;
2. Meningkatkan semangat jiwa toleransi dan beragama dan berbudaya;
3. Meningkatkan angka partisipasi perempuan dan berpolitik;
4. Meningkatkan semangat dalam berkepribadian bangsa untuk mencegah terjadinya revolusi mental;
5. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

b. Peluang

1. Otonomi Daerah;
2. Sumber Daya Manusia yang memadai;
3. Masyarakat yang masih memiliki jiwa toleransi;
4. Peran serta masyarakat yang tinggi;
5. Sikap gotong royong dan dukungan dari pemerintah daerah;
6. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan daerah;
7. Pancasila, GBHN dan UUD 1945, serta NKRI.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Kesbangpol. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Perangkat Daerah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **tabel T-C.31**.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 nilai;100 %	2.547.334.000	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 nilai;100 %	2.547.334.000	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	65 Orang	1.631.566.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	65 Orang	1.631.566.000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	65 orang	456.572.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	65 orang	456.572.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	65 orang	55.250.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	65 orang	55.250.000	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	65 orang	76.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	65 orang	76.000.000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 laporan	208.990.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 laporan	208.990.000	
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 laporan	145.650.000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 laporan	145.650.000	
II	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/ kota	7%	1.879.777.000	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7%	1.879.777.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Daerah yang Kondusif	7 Kabupaten/Kota	875.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Daerah yang Kondusif	7 Kabupaten/Kota	875.000.000	
2	Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Daerah Potensi Konflik	0 Daerah	1.004.777.000	Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Daerah Potensi Konflik	0 Daerah	1.004.777.000	
III	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi; persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0 %;1 %	5.827.669.100	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi; persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0 %;1 %	5.827.669.100	
1	Pembinaan Ideologi Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Masyarakat yang Memahami Ideologi Kebangsaan	1.080 Orang	343.680.000	Pembinaan Ideologi Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Masyarakat yang Memahami Ideologi Kebangsaan	1.080 Orang	343.680.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penguatan Bela Negara	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Masyarakat yang cinta tanah air	840 orang	296.610.000	Penguatan Bela Negara	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Masyarakat yang cinta tanah air	840 orang	296.610.000	
3	Penguatan Wawasan Kebangsaan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	20.000 orang	3.440.553.550	Penguatan Wawasan Kebangsaan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	20.000 orang	3.440.553.550	
4	Penguatan Pembauran Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Masyarakat yang melestarikan budaya dan menjaga kerukunan	5.000 orang	1.746.825.550	Penguatan Pembauran Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Masyarakat yang melestarikan budaya dan menjaga kerukunan	5.000 orang	1.746.825.550	
IV	Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah; persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	7 Jumlah;60 %	1.642.630.000	Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah; persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	7 Jumlah;60 %	1.642.630.000	

	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan	4 Laporan	250.000.000	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan	4 Laporan	250.000.000	
2	Penguatan Kapasitas Kelembagaan/ Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Peserta yang memahami sistem dan implementasi IDI	5 Orang	570.350.000	Penguatan Kapasitas Kelembagaan/ Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Peserta yang memahami sistem dan implementasi IDI	5 Orang	570.350.000	
3	Pembina Politik Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Masyarakat yang memahami Politik	840 Orang	522.280.000	Pembina Politik Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Masyarakat yang memahami Politik	840 Orang	522.280.000	
4	Penguatan Kelembagaan Parpol	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Parpol yang menjalankan tugas dan fungsinya	15 Lembaga	300.000.000	Penguatan Kelembagaan Parpol	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Parpol yang menjalankan tugas dan fungsinya	15 Lembaga	300.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	45 %;700 Orang;50 %	813.985.000	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	45 %;700 Orang;50 %	813.985.000	
1	Pencegahan dan penanggulangan Napza	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka	Jumlah Masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan napza	350 orang	90.463.000	Pencegahan dan penanggulangan Napza	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka	Jumlah Masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan napza	350 orang	90.463.000	
2	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Ormas yang ikut serta dalam pembangunan	30 Ormas	273.732.000	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Ormas yang ikut serta dalam pembangunan	30 Ormas	273.732.000	

1	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif					Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah pelaku seni yang ikut menjaga kesenian dan budaya	140 orang	114.815.000	Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah pelaku seni yang ikut menjaga kesenian dan budaya	140 orang	114.815.000	
4	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Laporan Angka Kesejangan Ekonomi	10 Laporan	334.975.000	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Laporan Angka Kesejangan Ekonomi	10 Laporan	334.975.000	
Jumlah					12.738.089.100	Jumlah					12.738.089.100

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-				
	-				
	-				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa Pokok-pokok Kebijakan program nasional Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

A. Arah Kebijakan Pembangunan Polhukhankam;

1. Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam;
2. Memperkuat aktualisasi ideologi negara;
3. Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antar negara;
4. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi.

Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.1. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza;
- b. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat;
- d. Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas

3.2.2. Sasaran

Merujuk pada tujuan seperti yang diuraikan diatas, maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- c. Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza.	persentase perubahan prilaku terhadap bahaya napza.	68%
2.	Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.	persentase menurunnya kasus konflik sosial.	60,8%
3.	Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat.	Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat.	persentase partisipasi memilih.	71%
4.	Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi.	62,8%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan renja tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menentukan program dan kegiatan.

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban pada misi ke-4 yaitu Meningkatkan kesehatan masyarakat dan ke-5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi. Program dan kegiatan yang mendukung pada misi ke-4 ada 1 (satu) program adalah program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sedangkan kegiatan yang mendukung misi ke-4 ada 1 (satu) kegiatan adalah kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Napza.

2. Pencapaian SDGs

Dalam pencapaian SDGs program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menitik berat pada :

1. target 16.1 secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun dengan indikator :

- a. Indikator 16.1.2 kematian disebabkan konflik per100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian;
- b. Kematian disebabkan konflik per100.000 penduduk;

2. Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dengan indikator :

- a. Indikator 16.7.1(a) persentase keterwakilan perempuan di dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. Indikator 16.7.2(a) Indeks Lembaga Demokrasi;
- c. Indikator 16.7.2(b) Indeks Kebebasan Sipil;
- d. Indikator 16.7.2(c) Indeks Hak-Hak Politik.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2020

Pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung yang sifatnya Rutin dan Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Teknis) dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai terdiri dari gaji dan tambahan Penghasilan

B. Belanja Langsung yang sifatnya Rutin (Penunjang)

I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

C. Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat)

I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

1. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional;
2. Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah.

II. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

1. Pembinaan Ideologi Kebangsaan;
2. Penguatan Bela Negara;
3. Penguatan Wawasan Kebangsaan;
4. Penguatan Pembauran Kebangsaan.

III. Program Pembinaan Politik dalam Negeri;

1. Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah;

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik;
3. Pembina Politik Daerah;
4. Penguatan Kelembagaan Parpol.

IV. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

1. Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama;
2. Pencegahan dan penanggulangan Napza;
3. Pembinaan dan Pengawasan Ormas;
4. Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya;
5. Pembangunan Ketahanan Ekonomi.

Sebagian besar lokasi melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebar di semua wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2020 pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di peroleh dari Bappeda sebesar Rp. 8.223.872.692,00.

- c. Rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, tetapi ada perbedaan pada pagu indikatif.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Nilai Lakip Badan Kesbangpol; Nilai kepuasan pelayanan sekretariat Badan Kesbangpol	3 nilai;100 %	2.334.762.000			3 nilai;100 %	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	65 Orang	1.565.020.000	Pendapatan Daerah		67 Orang	2.078.886.480
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	65 orang	437.252.000	Pendapatan Daerah		67 orang	2.693.460.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	65 orang	50.850.000	Pendapatan Daerah		67 orang	145.200.000
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	65 orang	50.000.000	Pendapatan Daerah		67 orang	145.000.000
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 laporan	137.390.000	Pendapatan Daerah		4 laporan	363.000.000
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	5 laporan	94.250.000	Pendapatan Daerah		5 laporan	179.625.600
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	19		Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	7%	773.050.000			5%	
1	5	19	5	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Daerah yang Kondusif	7 Kabupaten/Kota	343.050.000	-		7 Kabupaten/K ota	2.750.000.000
1	5	19	6	Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur	Jumlah Daerah Potensi Konflik (Daerah)	7 Kabupaten/Kota	430.000.000	-		7 Kabupaten/K ota	2.500.000.000
1	5	20		Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi; persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0 %;1 %	2.469.858.000			0 %;0 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	20	8	Pembinaan Ideologi Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Masyarakat yang Memahami Ideologi Kebangsaan (Orang)	1.080 Orang	300.995.000	-		1.080 Orang	1.050.000.000
1	5	20	9	Penguatan Bela Negara	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Masyarakat yang cinta tanah air (orang)	840 Orang	235.455.000	-		840 Orang	900.000.000
1	5	20	10	Penguatan Wawasan Kebangsaan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (orang)	20.000 Orang	1.718.808.000	-		20.000 Orang	2.400.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	20	11	Penguatan Pembauran Kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Masyarakat yang melestarikan budaya dan menjaga kerukunan (orang)	5.000 Orang	214.600.000	-		5.000 Orang	750.000.000
1	5	21		Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah; persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	7 Jumlah;60 %	1.642.700.000			7 Jumlah;70 %	
1	5	21	4	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Laporan (Laporan)	4 Laporan	314.900.000	-		4 Laporan	300.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	21	7	Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Lembaga Demokrasi yang membangun bidang politik (Berkas)	5 Berkas	460.950.000	-		5 Berkas	750.000.000
1	5	21	11	Pembinaan Politik Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Masyarakat yang memahami Politik (Orang)	840 Orang	620.900.000	-		840 Orang	875.000.000
1	5	21	12	Penguatan Kelembagaan Parpol	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Parpol yang menjalankan tugas dan fungsinya (Lembaga)	15 Lembaga	245.950.000	-		15 Lembaga	875.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	22		Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	45 %;700 Orang;50 %	1.003.502.692			55 %;900 Orang;60 %	
1	5	22	2	Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka	Jumlah rekomendasi	3 Rekomendasi	200.000.000	-		3 Rekomendasi	350.000.000
1	5	22	8	Pencegahan dan penanggulangan Napza	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka	Jumlah Masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan napza (orang)	350 Orang	268.475.692	-		350 Orang	1.200.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	22	9	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Ormas yang ikut serta dalam pembangunan (Ormas)	30 Ormas	253.612.000	-		30 Ormas	1.200.000.000
1	5	22	10	Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah pelaku seni yang ikut menjaga kesenian dan budaya (orang)	140 Orang	90.790.000	-		140 Orang	1.000.000.000
1	5	22	11	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Laporan Angka Kesejangan Ekonomi (Laporan)	10 Laporan	190.625.000	-		10 Laporan	1.000.000.000
					TOTAL			8.223.872.692				23.505.172.080

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, Rencana kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar terlaksana keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum PD di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program dan sektor.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 dalam rangka mensinkronisasikan dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra PD);
2. Di dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Demikian Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun anggaran 2020.

Pangkalpinang,

Juni 2019

KEPALA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Drs. H. TARMIN, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19681111 199009 1 001